

Bulan :

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |

| | |
|--------------|----------------|
| Media Online | news.detik.com |
| Media Cetak | |

Anies Bangun Rusun Akuarium Tuai Kontroversi Dewan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mulai membangun Kampung Susun Akuarium di Penjaringan, Jakarta Utara. Keputusan Anies menuai sorotan anggota DPRD DKI Jakarta.

Anies menyebut, peletakan batu pertama ini merupakan babak baru bagi warga Kampung Akuarium.

Kampung Susun Akuarium ini akan dibangun di atas lahan seluas 10 ribu meter persegi. Nantinya, akan ada 5 blok dengan total 241 unit dengan tipe 36.

Peletakan batu pertama sebagai pertanda pembangunan Kampung Susun Akuarium dilakukan Anies di Kampung Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara, pada Senin 17 Agustus 2020.

Kampung Susun Akuarium ini akan dibangun di atas lahan seluas 10 ribu meter persegi. Rencananya, akan ada 5 blok dengan total 241 unit dengan tipe 36.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta ingin menghadirkan rasa keadilan bagi setiap warganya. Salah satunya dengan memberikan hunian yang layak.

Langkah Anies menuai pro kontra dari sejumlah kalangan anggota DPRD DKI Jakarta. Anggota dewan memberikan catatan soal pembangunan Kampung Akuarium tersebut.

Berikut komentar sejumlah fraksi di DPRD DKI terkait langkah Anies ini:

Golkar: Revisi Perda Tata Ruang

Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta mendukung Anies dan Pemprov DKI Jakarta melakukan penataan kota DKI Jakarta, termasuk Kampung Akuarium.

"Hanya catatan dan masukan kami, agar hal-hal yang dulu menjadi kendala, baik teknis maupun administrasinya ditertibkan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari," kata Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPRD DKI Jakarta, Judistira Hermawan, saat dihubungi, Senin (17/8/2020).

Judistira mengungkapkan Fraksi Golkar DPRD DKI hingga kini belum menerima revisi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Zonasi. Dia mendesak kepada Pemprov DKI agar segera memberikan draf revisi tersebut.

Menurut dia, apabila aturan administrasi dapat segera diselesaikan maka kejelasan mengenai lahan yang digunakan untuk membangun kembali Kampung Susun Akuarium tidak akan menjadi masalah di kemudian hari.

Lebih lanjut, Judistira mengatakan, Pemprov DKI boleh membangun di zona merah untuk membangun rumah susun. Menurutnya, pembangunan itu bisa dilakukan sambil penyempurnaan revisi Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang RDTR dan Zonasi.